



## **ANALISIS PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE, SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN STUDI PADA SELURUH SKPD PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH**

Amiroh Zumar Hanifah  
Haryanto<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of implementing good governance, government accounting systems and internal control on the quality of financial reports. In this study the dependent variable consisting of Good Governance, Government Accounting Systems and Internal Control. The independent variable in this study is the Quality of Financial Statements.*

*This research was conducted with primary data, namely distributing questionnaires to predetermined populations and samples, namely all SKPD Financial Managers in BPPKAD / BPKAD / BPKD / DPPKAD / BKD throughout Central Java. Data analysis techniques used PLS (Partial Least Squares) software*

*The results showed that the implementation of good governance had no significant effect on the quality of financial reports, while the application of the government accounting system and internal control had a significant effect on the quality of financial reports.*

*Keywords: Good Governance, Government Accounting System, Internal Control, Quality of Financial Statements.*

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah dituntut harus selalu melaporkan kegiatan nya selama satu tahun berjalan, yang berupa laporan keuangan. Dimana laporan keuangan yang dilaporkan harus berkualitas baik dari segi informasi ataupun penulisannya. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum.

Penerapan prinsip *good governance* dapat menghasilkan kegiatan pemerintahan yang bersih dan baik, sebagaimana *good governance* mampu berpengaruh dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah dan juga hubungannya dengan *stakeholders* yang ada (Yusniyar, Darwanis dan Syakriy, 2016). Menurut penelitian Batubara (2006) disimpulkan bahwa pelaksanaan *good governance* adalah suatu bentuk baru dari skema keuangan.

Dalam upaya mendapatkan hasil informasi laporan keuangan yang mampu memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan maka dari itu dilakukan oleh pihak yang kompeten di bidangnya. Kualitas dari laporan keuangan menunjukkan bahwa Kepala SKPD telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab nya. Laporan keuangan dikatakan berkualitas adalah ketika laporan sudah dibuat secara transparansi dan akuntabel, yang mana ditandai dengan pernyataan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian internal wajib diuji terkait dengan pelaksanaan pengendalian tersebut sudah sejalan dengan susunan dan memenuhi syarat yang ditetapkan

---

<sup>1</sup> Corresponding author

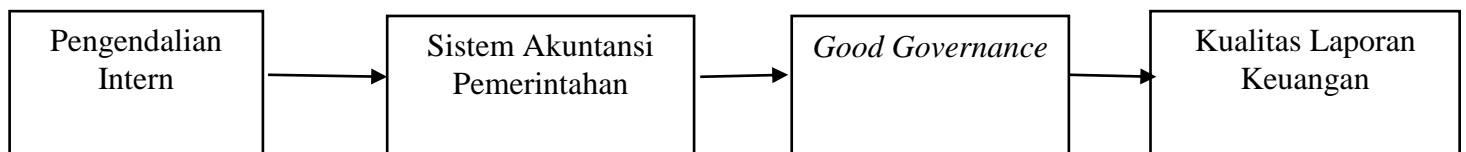
---

dan tujuan dari pelaksanaannya untuk mengimplementasikan pengendalian tersebut secara efektif (Yusniyar, Darwanis dan Syakriy, 2016).

Tujuan melakukan penelitian ini, harapannya peneliti bisa membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan untuk menerapkan *good governance*, pengendalian intern, dan sistem akuntansi pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

### KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan pengaruh antara penerapan *Good Governance*, SAP dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan yang telah dibahas sebelumnya, maka kerangka teoritis dari penelitian ini yaitu:



#### Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan *good governance* dilakukan dengan berdasar prinsip-prinsipnya, seperti keterbukaan, keterlibatan masyarakat, taat hukum dan akuntabel agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian dari Azlim, Darwanis dan Bakar (2012) yang mana terdapat pengaruh dengan menerapkan sistem *good governance* pada kualitas laporan keuangan dari SKPD yang dihasilkan di Kota Banda Aceh. Penelitian lain yang mendukung yakni penelitian Yusniyar, Darwanis dan Syakriy (2016) bahwa *good governance* memiliki dampak positif pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, berikut hipotesisnya:

*H<sub>1</sub>: Penerapan good governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.*

#### Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Agar pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan kualitas dan mampu dipahami oleh seluruh pihak, maka harus dilakukan penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang baik. Hal ini berarti pada saat menyusun laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu tercipta jika tidak ada dukungan dari sistem akuntansi pemerintahan yang baik pula.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Ihsanti (2014) yang menyatakan laporan keuangan dari SKPD di Kab. Lima Puluh Kota mendapatkan pengaruh dari SDM dan penerapan SAK daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Nurilah (2014) menyatakan bahwasannya penerapan sistem akuntansi pemerintah memiliki dampak positif pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Pemkot Depok.

*H<sub>2</sub>: Penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pengelola Keuangan Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah.*

#### Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang harus diterapkan oleh organisasi dalam hal mencapai tujuan. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan cara-cara tentang manajemen kepastian bahwa perusahaan telah berhasil dalam hal tujuan dan



targetnya (Arens,2008). Pengendalian intern yang baik dapat membantu dalam mengurangi risiko kesalahan terutama dalam laporan keuangan.

Penelitian yang sejalan lainnya dilakukan Ihsanti (2014) yang mengungkapkan bahwasannya sistem pengendalian internal memiliki dampak yang positif pada kualitas laporan keuangan yang daerah dihasilkan. Selain itu penelitian Herawati (2014) juga menyatakan hal yang serupa bahwasannya sistem pengendalian internal memiliki dampak positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Pemkab Cianjur. Sesuai dengan penjelasan tersebut, berikut hipotesisnya:

*H<sub>3</sub>: Penerapan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.*

**Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penerapan *Good governance* yang baik adalah terdiri dari transparansi informasi keuangan dan non keuangan dan juga melibatkan peran serta masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (Azlim, Darwanis dan Bakar 2012). Selain itu dalam upaya menghasilkan laporan yang berkualitas pemimpin diharuskan dapat menerapkan SAP yang sama dengan pengendalian intern.

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian Hastuti (2017) yaitu bahwa penerapan pengendalian intern, sistem akuntansi pemerintahan, dan *good governance* yang dilakukan bersamaan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan

*H<sub>4</sub>: Penerapan good governance, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel independen terdiri dari good governance, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern, sedangkan untuk variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan. Pengukuran variabel dilakukan dengan skala ordinal yaitu terdiri dari lima tingkatan.

Penggunaan populasi dan sampel disini yaitu semua SKPD Pengelola Keuangan pada BPPKAD/ BPKAD/ BPKD/ DPPKAD/ BKD Pemda se-Jateng, Yaitu terdapat 35 BPPKAD/ BPKAD/ BPKD/ DPPKAD/ BKD. Dengan sampel yang ditentukan melalui metode purposive sampling, yaitu 3 orang dalam setiap BPPKAD/BPKAD/BPKD/DPPKAD/BKD Pemerintah Daerah yang ada di Jawa Tengah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepala SKPD pada BPPKAD/ BPKAD/ BPKD/ DPPKAD/ BKD Pemda se-Jateng.
2. Sekretaris SKPD pada BPPKAD/ BPKAD/ DPPKAD/ BKD Pemda se-Jateng.
3. Pegawai SKPD yang bekerja pada akuntansi/keuangan pada BPPKAD/ BPKAD/ BPKD/ DPPKAD/ BKD Pemda se-Jateng.

### **Metode Analisis**

Hipotesis dapat diuji dengan software PLS ( *Partial Least Squares*) yang merupakan analisis yang sangat kuat karena tidak menganggap asumsi OLS (*Ordinary Least Squares*), seperti data harus memiliki diistribusi normal dan tidak terdapat masalah multikolonieritas antar variabel eksogen, sehingga disebut juga *soft modeling*



(Ghozali dan Latan, 2019). Pengujian hipotesis dilakukan dengan software PLS ( *Partial Least Squares*), yang terdiri dari uji outer model dan inner model.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian ini adalah SKPD Pengelola Keuangan pada BPPKAD/ BPKAD/BPKD/ DPPKAD/ BKD seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Dalam hal ini terdapat 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan pengambilan tiga responden untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga total responden adalah 105 responden. Berikut adalah rincian sampel penelitian :

Tabel 1

Daftar Sampel Penelitian

No	Nama BPPKAD/ BPKAD/ BPKD/ DPPKAD/ BKD Kabupaten/ Kota
1	Kabupaten Cilacap
2	Kabupaten Banyumas
3	Kabupaten Purbalingga
4	Kabupaten Banjarnegara
5	Kabupaten Kebumen
6	Kabupaten Purworejo
7	Kabupaten Wonosobo
8	Kabupaten Magelang
9	Kabupaten Boyolali
10	Kabupaten Klaten
11	Kabupaten Sukoharjo
12	Kabupaten Wonogiri
13	Kabupaten Karanganyar
14	Kabupaten Sragen
15	Kabupaten Grobogan
16	Kabupaten Blora
17	Kabupaten Rembang
18	Kabupaten Pati
19	Kabupaten Kudus
20	Kabupaten Jepara
21	Kabupaten Demak
22	Kabupaten Semarang
23	Kabupaten Tangerang
24	Kabupaten Kendal
25	Kabupaten Batang
26	Kabupaten Pekalongan
27	Kabupaten Pemalang
28	Kabupaten Tegal
29	Kabupaten Brebes
30	Kota Magelang
31	Kota Surakarta
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Pekalongan
35	Kota Tegal

Tabel 2  
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Standar Deviasi
<i>Good Governance</i>	105	50,00	70,00	61,5238	61,0000	5,63829
Sistem Akuntansi Pemerintahan	105	34,00	50,00	45,5524	46,0000	4,14168
Pengendalian Intern	105	38,00	60,00	51,9238	50,0000	5,55513
Kualitas Laporan Keuangan	105	32,00	45,00	39,9619	40,0000	4,09954

Sumber: Data diolah , 2021

Tabel 3  
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics
<i>Good governance</i> -> Kualitas LK	0,070	0,074	0,097	0,724
Pengendalian Intern - > Kualitas LK	0,320	0,324	0,079	4,072
SAP -> Kualitas LK	0,543	0,537	0,090	6,059

Sumber: Data diolah ,2021

Hasil Pengujian hipotesis pertama diketahui besarnya koefisien jalur 0,070, sedangkan nilai t 0,724. Nilai tersebut kurang dari t tabel yaitu 1,960. Sehingga dinyatakan *good governance* berpengaruh positif namun tidak signifikan pada kualitas laporan keuangan, dan **Hipotesis 1 ditolak**. Hal tersebut membuktikan penerapan *Good governance* dalam BPPKAD/ BPKAD/ BPKD/ DPPKAD/ BKD kurang memberikan kontribusi dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat.

Pengujian hipotesis kedua dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,543 dan nilai t 6,059. Nilai ini telah melebihi dari t tabel 1,960, sehingga akuntansi pemerintah memiliki hubungan yang positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti **Hipotesis 2 diterima**. Itu artinya bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada BPPKAD/ BPKAD/ BPKD/ DPPKAD/ BKD cukup memberikan pengaruh dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengujian ketiga diperoleh informasi nilai koefisien jalur 0,320 dengan nilai t 4,072, yang mana nilai t lebih besar dari nilai t tabel. Dari informasi tersebut kesimpulannya pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa **Hipotesis 3 diterima**.

Tabel 4  
Hasil R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Kualitas LK	0,743	0,736

Sumber: Data diolah, 2021

Diketahui R-Square untuk variabel bebas masing-masing sebesar 0,743 atau 74,3% yang itu artinya termasuk dalam kategori kuat. Selanjutnya nilai R-Square



mengindikasikan bahwa pengaruh semua variabel bebas penelitian ini terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 74,3% dan sebesar 25,7% berasal dari pengaruh variabel lain diluar penelitian. Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan **Hipotesis 4 diterima**. Dapat diketahui bahwa penerapan *good governance*, pengendalian intern, dan sistem akuntansi pemerintahan secara bersamaan pada BPPKAD/ BPKAD/ BPKD/ DPPKAD/ BKD memiliki pengaruh signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan

## KESIMPULAN

Merujuk dari uraian yang sudah dibahas dan dijelaskan secara umum dapat disimpulkan bahwa *good governance* kurang memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Disamping itu sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk ketiga variabel secara bersamaan yaitu *good governance*, sistem akuntansi pemerintah dan pengendalian intern secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terkait penyebaran yang hanya dilakukan dengan cara menitipkan di bagian resepsionis masing-masing SKPD, sehingga peneliti tidak bisa memastikan apakah kuesioner sudah di isi sesuai dengan sampel yang sudah ditentukan.

## REFERENSI

- Arens, Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Jilid I, Jakarta: Erlangga.*
- Azlim, Darwanis, dan Usman Bakar. 2012. *Pengaruh Penerapan Good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Hlm: 1- 14.*
- Batubara, Alwi Hasyim. 2006. *Konsep Good governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, 3(1): 1-4.*
- Ghozali dan Latan. 2019. *PARTIAL LEAST SQUARES KONSEP, TEHNIK DAN APLIKASI Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (Edisi 2). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*
- Herawati, Tuti. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Study & Accounting Research Vol XI, No. 1.*
- Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang.*
- Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.*



Sri Hastuti, Hilda. 2016. *"Pengaruh Good governance, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)"*Skripsi. Palembang: Universitas Muhamadiyah Palembang.

Yusniyar, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap Good governance dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh)*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Hlm: 1-12.